



FRIKSI KEBERLANJUTAN COMMUNITY-BASED TOURISM DI DESA WISATA BILEBANTE

Oleh
I Gusti Agung Pradnyadari¹⁾, Novita Restiati Ina Wea²⁾, I Putu Arya Mulyawan³⁾,
Eki Melina Widanti⁴⁾

^{1,2}Universitas Udayana, Bali, Indonesia

³Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Bali, Indonesia

⁴Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: *¹agungpradnyadari@unud.ac.id, ²novitarestiati@unud.ac.id,
³arya.mulyawan@instiki.ac.id, ⁴ekimelina@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika tata kelola dan friksi keberlanjutan Community-Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Bilebante, Lombok Tengah, yang telah berstatus desa wisata mandiri namun menghadapi kerentanan struktural. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 12 informan kunci, pendukung, dan triangulasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan penekanan pada tema partisipasi, ekonomi lokal, lingkungan, budaya, dan tata kelola kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBT di Bilebante telah membangun partisipasi masyarakat, keragaman atraksi berbasis alam dan budaya, serta kerangka kelembagaan formal (POKDARWIS, BUMDes, Perdes). Namun, keberlanjutan dibayangi friksi berupa lemahnya regenerasi aktor, ketergantungan pada wisata berbasis reservasi kelompok, ketiadaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terbatasnya diversifikasi produk budaya, dan rendahnya kapasitas bahasa asing pemandu. Kondisi ini mengindikasikan community-driven development without strong governance support yang menghasilkan keberlanjutan semu (pseudo-sustainability). Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan CBT tidak cukup diukur dari tingkat partisipasi, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, kapasitas institusi lokal, dan dukungan struktural lintas pemangku kepentingan.

Kata Kunci: *Community-Based Tourism (CBT), Good Tourism Governance, Pariwisata Berkelanjutan, Desa Wisata Bilebante, Friksi Keberlanjutan Pariwisata*

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat atensi khusus seiring penetapan Mandalika sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Kedekatan geografis Mandalika dengan desa-desa sekitarnya, termasuk Desa Bilebante di Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, secara tidak langsung menciptakan peluang dan tanggung jawab bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang berkualitas dan berkelanjutan. Desa Bilebante, yang secara etimologis bermakna pohon Maja (bile) yang dililit semak belukar (bante), memiliki potensi green tourism yang

kuat dengan area sawah seluas 212 ha, kebun 87 ha, dan budidaya rumput laut. Potensi alam ini menjadikannya lokasi ideal untuk penerapan konsep CBT sebagai pilar utama pariwisata berkelanjutan. Konsep ini muncul sebagai antitesis terhadap model pembangunan top-down yang kerap mengabaikan karakteristik unik, spesifisitas, keragaman, dan kebutuhan komunitas lokal. Sebaliknya, CBT mengadvokasi pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat lokal sebagai penggerak utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat pariwisata (Budiatiningsih et al., 2024; Syarifah & Rochani, 2022). Pendekatan



ini berfokus pada penguatan modal sosial masyarakat, pembangunan kapasitas sumber daya manusia, dan pembentukan kelembagaan lokal yang kokoh untuk memastikan keberlanjutan.

Hal ini selaras dengan gagasan bahwa CBT merupakan pendekatan berkelanjutan yang biasanya, inisiatif ini lahir dari internal struggle (Pradnyadari, 2023). Meskipun demikian, implementasi CBT seringkali menghadapi tantangan yang signifikan, seperti kebutuhan akan sumber daya yang substansial dan dukungan kelembagaan eksternal, yang dapat membebani anggaran pemerintah serta menimbulkan ketergantungan pada pendanaan luar (Putra et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang juga berfokus pada pembentukan ekosistem pendukung yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan (Febrian & Suresti, 2020; Rahmadani & Agustina, 2024).

Pendekatan ini mengkritisi model pembangunan konvensional yang kerap mengabaikan keunikan dan kebutuhan spesifik komunitas, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dari tahap awal hingga akhir program (2020; Kriska et al., 2019). Meskipun Desa Bilebante telah diakui sebagai desa wisata yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, literatur terdahulu yang mengkaji lokasi ini cenderung berfokus pada aspek parsial, seperti wellness tourism pasca-COVID-19, partisipasi masyarakat, atau peran perempuan dalam pariwisata. Dalam lima tahun terakhir, kajian CBT menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan, kepemimpinan lokal, dan jejaring antarpemangku kepentingan. Perkembangan desa wisata tidak selalu berbanding lurus dengan keberlanjutan jangka panjang. Banyak inisiatif CBT menghadapi persoalan stagnasi akibat lemahnya tata kelola, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan ketergantungan pada pasar tertentu.

Studi terbaru menunjukkan bahwa kegagalan CBT sering kali bukan disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, melainkan lemahnya tata kelola, regulasi

internal, dan dukungan institusional (Rasoolimanesh et al., 2022). Oleh karena itu, CBT perlu dipahami tidak hanya sebagai praktik partisipatif, tetapi juga sebagai sistem tata kelola pariwisata berbasis komunitas. Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan utama, seperti penelitian CBT di desa wisata masih dominan bersifat deskriptif, belum cukup kritis dalam membedah persoalan struktural. Meskipun CBT sering dipromosikan sebagai model pariwisata berkelanjutan, sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana lemahnya tata kelola kelembagaan justru menjadi sumber utama friksi keberlanjutan, bahkan ketika partisipasi masyarakat sudah tinggi.

LANDASAN TEORI

Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pariwisata berkelanjutan dalam penelitian ini diposisikan sebagai kerangka normatif untuk menilai sejauh mana pengembangan Desa Wisata Bilebante mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya komunitas lokal. Secara konseptual, pariwisata berkelanjutan berakar pada gagasan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya, melalui pengelolaan sumber daya yang terencana, terpadu, dan berkeadilan.

Dalam konteks pariwisata, Kurniawati (2013) merumuskan sejumlah prinsip kunci, antara lain: partisipasi masyarakat, keterlibatan para pemangku kepentingan, kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, pemenuhan tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitoring dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan, dan promosi yang selaras dengan karakter dan identitas lokal.

Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak dapat direduksi pada aspek lingkungan semata, tetapi merupakan fungsi



dari tata kelola yang baik (good governance) yang menjamin distribusi manfaat yang adil, perlindungan hak masyarakat lokal atas sumber daya, serta mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Sunaryo (2013) menegaskan bahwa good tourism governance menjadi prasyarat agar tujuan pembangunan pariwisata tercapai secara berkelanjutan, melalui koordinasi program antar pemerintah, industri, dan masyarakat, serta pelibatan aktif komunitas dalam seluruh siklus kebijakan.

Konsep Community-Based Tourism (CBT)

Community-Based Tourism (CBT) dipahami sebagai bentuk pengembangan pariwisata yang menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan manfaat pariwisata, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat. Giampiccoli dan Mtapuri (2014) menekankan bahwa CBT idealnya bukan hanya skema partisipasi, tetapi instrumen redistribusi kekuasaan dan manfaat yang memberi kontrol nyata kepada komunitas atas sumber daya pariwisata di wilayah mereka.

Suansri (2003: 21-22) merumuskan lima prinsip utama CBT: (1) ekonomi—hadirnya lapangan kerja, pendapatan, dan dana komunitas; (2) sosial—peningkatan kualitas hidup, kebanggaan komunitas, serta pembagian peran yang adil lintas gender dan generasi; (3) budaya—penghormatan dan pelestarian budaya lokal sekaligus fasilitasi pertukaran budaya; (4) lingkungan—perlindungan carrying capacity dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; dan (5) politik/kelembagaan—penguatan partisipasi, kekuasaan kolektif, dan jaminan hak masyarakat atas sumber daya alam. Kelima prinsip ini memposisikan CBT sebagai praktik pembangunan yang berangkat “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”, bukan sekadar menjadikan warga sebagai tenaga kerja murah dalam industri pariwisata.

Dalam perkembangan mutakhir, CBT

juga dibaca sebagai praktik tata kelola governance berbasis komunitas. Su, Wall, dan Xu menegaskan bahwa keberhasilan CBT ditentukan oleh kualitas hubungan antara komunitas, negara, dan pasar—terutama bagaimana lembaga lokal, regulasi, dan dukungan pemerintah memungkinkan komunitas mengelola pariwisata secara otonom namun tetap terhubung dengan jaringan eksternal. Rasoolimanesh et al (2022) menunjukkan bahwa banyak inisiatif CBT gagal bukan karena rendahnya partisipasi masyarakat, melainkan karena lemahnya tata kelola kelembagaan, regulasi internal, dan dukungan institusional yang berujung pada keberlanjutan semu (pseudo-sustainability).

Penelitian ini memanfaatkan kerangka CBT tersebut untuk membaca dinamika Desa Wisata Bilebante. Secara normatif, Bilebante telah mengadopsi hampir semua prinsip CBT: partisipasi masyarakat tinggi, manfaat ekonomi dirasakan melalui UMKM dan homestay, budaya lokal dikemas dalam festival dan paket wisata, serta terdapat kerangka kelembagaan formal seperti POKDARWIS, BUMDes, dan Perdes desa wisata. Namun, temuan lapangan memperlihatkan adanya ketidakseimbangan: ekonomi sangat bergantung pada reservasi rombongan, regenerasi aktor lemah, pengelolaan lingkungan (khususnya sampah) belum didukung infrastruktur memadai, dan kapasitas kelembagaan belum cukup adaptif.

Dengan demikian, penelitian ini memposisikan Bilebante sebagai kasus CBT yang “secara prinsip sudah berjalan, tetapi secara tata kelola masih timpang”, sehingga menjadi contoh konkret bagaimana prinsip CBT Suansri dan kerangka CBT—governance ala Giampiccoli & Mtapuri serta Su, Wall & Xu beroperasi—and berbenturan—dalam konteks desa wisata mandiri di Indonesia.

Desa Wisata

Konsep desa wisata dalam penelitian ini diposisikan sebagai konteks spasial sekaligus arena implementasi CBT dan good tourism governance di Desa Wisata Bilebante. Desa wisata tidak dipahami sekadar sebagai



“produk wisata baru”, tetapi sebagai ruang hidup pedesaan yang diorganisasi menjadi pengalaman wisata tanpa melepaskan fungsi sosial, budaya, dan ekologisnya.

Secara konseptual, desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa—lingkungan fisik, kehidupan sosial, dan praktik budaya—yang dikemas sebagai daya tarik wisata. Damanik (2013:45–47) menekankan bahwa village tourism idealnya menghadirkan pengalaman yang autentik, di mana wisatawan berinteraksi langsung dengan keseharian warga dan lanskap agraris, bukan sekadar mengonsumsi atraksi buatan. Ahmed dan Jahan (2013:163–165) menunjukkan bahwa pariwisata perdesaan yang berhasil adalah yang memanfaatkan potensi lokal tanpa merusak karakter sosial dan ekologis wilayah tersebut.

Dalam kerangka tersebut, desa wisata tidak boleh direduksi menjadi “desa yang memiliki objek foto menarik”, tetapi harus dipahami sebagai sistem sosial ekologis yang rentan terhadap tekanan pasar pariwisata dan karenanya membutuhkan tata kelola yang hati-hati.

Pengembangan desa wisata berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal dan keberlanjutan, dengan prinsip “dari, oleh, dan untuk masyarakat”. Wijayanti dan Purwoko (2023:12–14) menegaskan bahwa tujuan utama desa wisata adalah meningkatkan kesejahteraan warga melalui pemanfaatan sumber daya lokal, dengan dua indikator utama: (1) kegiatan wisata berbasis sumber daya desa; dan (2) adanya interaksi langsung antara penduduk dan wisatawan yang bernilai edukatif dan ekonomis.

Dari sisi pengelolaan, Purmada, Wilopo, dan Hakim (2016:16–18) menekankan bahwa desa wisata hanya dapat berkelanjutan jika ada manajemen yang jelas terhadap atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan (4A), termasuk mekanisme menjaga kualitas daya tarik dan mengelola dampak wisata terhadap masyarakat. Artinya,

desa wisata bukan hanya persoalan “apa yang ditawarkan”, tetapi juga “bagaimana dikelola dan untuk siapa manfaatnya dibagikan”. Literatur terbaru menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama pengelolaan desa wisata, dengan pemerintah, industri, akademisi, dan media sebagai mitra pendukung (pentahelix). Crăciun et al. (2022:5–7) menunjukkan bahwa desa wisata yang berhasil mempunyai komunitas yang mampu mempertahankan, mengontrol, melindungi, dan mengembangkan potensi alam dan budaya, sekaligus menjalin kemitraan yang relatif setara dengan aktor eksternal.

Sunaryo (2013:89–92) memformulasikan konsep good tourism governance yang menekankan koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan, partisipasi aktif masyarakat dalam siklus perencanaan–pelaksanaan–evaluasi, serta akuntabilitas pengelolaan pariwisata di tingkat destinasi. Hulu (2016:75–77), melalui studi kasus desa wisata Blue Lagoon, menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah yang efektif bukan sebagai pengendali tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan pendamping yang memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola desa wisata.

Dalam perspektif tersebut, desa wisata menjadi ruang praksis CBT: komunitas tidak hanya diikutsertakan, tetapi memegang peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat, sementara pemerintah dan pihak lain menyediakan dukungan regulatif, teknis, dan jaringan pasar.

Mengacu pada klasifikasi Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kemenparekraf, Desa Bilebante dikategorikan sebagai desa wisata “mandiri”, dengan atraksi berbasis kehidupan sehari-hari (Pasar Pancingan, aktivitas pertanian, kebun herbal, homestay) dan paket budaya yang memanfaatkan kearifan lokal. Kondisi ini, secara konseptual, memenuhi dua indikator utama desa wisata sebagaimana dikemukakan Hadi, Lume, dan Widyaningrum (2022:33–35), yakni kegiatan berbasis sumber



daya desa dan interaksi langsung warga-wisatawan. Dari perspektif konsep desa wisata dan good tourism governance (Sunaryo, 2013:89–92), Bilebante dapat dibaca sebagai desa wisata yang secara formal telah memenuhi atribut destinasi, tetapi secara substantif masih berjuang menjadikan desa wisata sebagai instrumen pemberdayaan dan keberlanjutan jangka panjang, bukan sekadar label program.

Good Tourism Governance

Dalam konteks pariwisata, good governance dipahami sebagai tata kelola yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, koordinasi antar-aktor, dan supremasi hukum dalam pengelolaan destinasi. Sunaryo (2013) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk membangun koordinasi program, mengintegrasikan kepentingan publik-privat, dan menjamin partisipasi bermakna masyarakat lokal dalam siklus perencanaan-pelaksanaan-evaluasi.

Sejalan dengan itu, Su, Wall, dan Xu (2020) melihat CBT sebagai praktik governance yang menempatkan komunitas bukan sekadar penerima manfaat, melainkan subjek yang bernegosiasi dengan negara dan pasar dalam pengelolaan sumber daya pariwisata. Good tourism governance dalam kerangka CBT mensyaratkan tiga prasyarat: kapasitas kelembagaan lokal yang memadai, dukungan regulatif dan fiskal dari pemerintah, serta mekanisme akuntabilitas yang memberi ruang suara bagi kelompok rentan dalam komunitas.

Nambisan (2008) menambahkan, dari perspektif inovasi sektor publik, pemerintah idealnya berperan sebagai innovation integrator, seeker, champion, dan catalyst yang mengorkestrasi jejaring kolaborasi dengan warga, LSM, dan pelaku usaha untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola destinasi. Dalam konteks desa wisata, peran-peran ini krusial untuk mengatasi keterbatasan sumber daya komunitas dan mencegah CBT

jatuh pada community-driven development yang tidak ditopang secara memadai oleh struktur governance yang lebih luas.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini memposisikan friksi keberlanjutan CBT di Desa Wisata Bilebante sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan antara partisipasi komunitas yang tinggi dan kualitas tata kelola yang belum matang. Dengan merujuk pada Sunaryo (2013), Rasoolimanesh et al. (2022), serta Su, Wall, dan Xu (2020), kajian ini menggunakan lensa good tourism governance untuk membaca bagaimana kapasitas kelembagaan, koordinasi pentahelix, dan dukungan struktural pemerintah membentuk, sekaligus membatasi, keberlanjutan CBT di tingkat desa wisata. Efektivitas implementasi CBT sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pariwisata yang mencakup kapasitas kelembagaan, kepemimpinan lokal, regulasi internal, serta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan eksternal. Kelemahan pada aspek tata kelola berpotensi menimbulkan friksi keberlanjutan meskipun partisipasi masyarakat relatif tinggi, sehingga menghasilkan pembangunan pariwisata berbasis komunitas yang tidak sepenuhnya berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif, yang berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat bersifat kontekstual, dinamis, dan dikonstruksi melalui interaksi antar-aktor (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini relevan untuk menelaah Community-Based Tourism (CBT) karena praktik CBT tidak hanya berkaitan dengan hasil ekonomi, tetapi juga nilai, persepsi, relasi kuasa, dan dinamika kelembagaan dalam komunitas lokal. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena dari perspektif partisipan dengan menekankan makna yang



mereka konstruksikan. Dalam konteks Desa Bilebante, pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi bagaimana masyarakat memaknai partisipasi, keberlanjutan, dan manfaat pariwisata. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman langsung dalam pengelolaan pariwisata desa (Patton, 2015).

Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan tingkat keterlibatan, kewenangan, dan pengetahuan terhadap pengelolaan CBT di desa wisata. Setiap informan memiliki kontribusi data yang berbeda dan saling melengkapi untuk membangun pemahaman komprehensif terhadap implementasi CBT. Sebanyak 12 informan dilibatkan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi informan kunci, informan pendukung, dan juga informan triangulasi. Proses pengumpulan data mengikuti prinsip data saturation, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika tidak ditemukan informasi baru yang signifikan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi literatur, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan dalam mengekspresikan pengalaman, pandangan, dan interpretasi mereka terkait pengelolaan CBT. Wawancara kualitatif digunakan untuk menggali makna subjektif yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Studi dokumentasi mencakup analisis dokumen resmi desa, arsip POKDARWIS, laporan kegiatan, dan regulasi terkait pengelolaan pariwisata. Dokumen digunakan untuk memperkuat konteks historis dan kebijakan (Bowen, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti memposisikan diri sebagai outsider yang mengamati setiap aktivitas wisata yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wisata Bilebante. Peneliti terlibat langsung dengan lokus penelitian, tetapi tidak ikut terlibat aktif dalam aktivitas pariwisata di desa.

3.1 Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model ini bersifat siklikal dan berlangsung secara simultan sejak proses pengumpulan data. Dimulai dari reduksi data, yaitu data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikode, dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan tata kelola pariwisata. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matriks, tabel tematik, dan narasi analitis untuk memudahkan interpretasi hubungan antarvariabel. Kesimpulan ditarik secara bertahap dan diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Teknik yang digunakan meliputi triangulasi, pengecekan anggota (member checking), dan audit jejak penelitian (audit trail).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Eksisting Komponen 4A Desa Wisata Bilebante

Analisis kondisi eksisting produk pariwisata Desa Bilebante menggunakan kerangka 4A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan Ancillary) dilakukan untuk menilai potensi dan kesiapan desa dalam mendukung CBT dan pariwisata berkelanjutan. Komponen atraksi dan ancillary di Bilebante tergolong sangat kuat, terutama inisiasi green tourism yang didukung regulasi desa. Namun, kelemahan mendasar terletak pada Aksesibilitas (jalan menuju sekretariat) dan Amenitas (keterbatasan lahan parkir yang berkelanjutan). Friksi ini berpotensi menghambat pertumbuhan kunjungan dan menciptakan citra negatif jika tidak diatasi. Keterhubungan lokasi dengan DPSP Mandalika menjadikan perbaikan aksesibilitas sebagai prasyarat penting untuk menangkap limpahan wisatawan.

4.1.1 Atraksi (Attraction)

Desa Bilebante memiliki basis atraksi yang relatif lengkap: lanskap persawahan 212



ha, kebun 87 ha, kebun herbal, budidaya rumput laut, Pasar Pancingan, homestay berbasis kehidupan sehari-hari, serta paket budaya seperti Festival Sapi Pale, tari Puspanjali, cooking class, dan produk kearifan lokal (durian purba, magic oil). Atraksi ini selaras dengan karakter green tourism dan wisata perdesaan yang menekankan pada pengalaman autentik, interaksi dengan warga, dan kedekatan dengan alam. Diversifikasi atraksi memberi peluang memperpanjang length of stay dan memperluas sebaran manfaat ekonomi, tetapi sebagian produk budaya masih bersifat event-based dan belum memiliki kalender atraksi yang pasti, sehingga kontinuitas pengalaman wisata belum sepenuhnya terjamin.

4.1.2 Aksesibilitas (Accessibility)

Secara makro, Bilebante diuntungkan oleh kedekatannya dengan KEK Mandalika ($\pm 8,1$ km/15–20 menit), yang membuka peluang menangkap limpahan wisatawan dari DPSP. Namun, pada level mikro, akses menuju titik-titik penting seperti sekretariat desa wisata dan area aktivitas utama masih terkendala kualitas dan lebar jalan, serta belum ditopang sistem penunjuk arah yang memadai. Keterbatasan ini berpotensi menciptakan bottleneck saat kunjungan rombongan, mengganggu kenyamanan, dan memperkuat ketergantungan pada pola kunjungan terorganisir (rombongan dengan bus tertentu), bukan kunjungan individu yang spontan.

4.1.3 Amenitas (Amenity)

Amenitas dasar seperti mushala, toilet umum, tempat sampah, dan homestay telah tersedia di kawasan Pasar Pancingan dan sekitarnya, menunjukkan adanya manfaat ekonomi langsung ke rumah tangga lokal sesuai semangat CBT. Meski demikian, keterbatasan lahan parkir yang memadai dan berkelanjutan, minimnya fasilitas keamanan (CCTV, titik P3K), serta belum meratanya standar kenyamanan homestay menjadi catatan penting. Kondisi ini menunjukkan bahwa amenitas belum sepenuhnya mengikuti standar good tourism governance yang menuntut keamanan, kenyamanan, dan

akuntabilitas pelayanan sebagai bagian dari mutu destinasi.

4.1.4 Ancillary (Lembaga Penunjang)

Dari sisi ancillary, Bilebante memiliki kerangka kelembagaan yang relatif kuat: keberadaan POKDARWIS, BUMDes, koperasi, dan jejaring mitra kerja sama yang berpayung pada Perdes No. 03 Tahun 2016. Secara normatif, ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip good tourism governance yang menekankan peran komunitas lokal sebagai aktor utama yang didukung regulasi dan kolaborasi multiaktor. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan ini belum sepenuhnya diikuti tata kelola adaptif, koordinasi, regenerasi pengelola, dan mekanisme akuntabilitas masih lemah, sehingga kekuatan ancillary lebih tampak pada sisi legal-formal daripada operasional.

Secara keseluruhan, profil 4A Bilebante dapat dibaca sebagai destinasi dengan atraksi dan kerangka kelembagaan yang menjanjikan, tetapi dibayangi kelemahan pada aksesibilitas, amenitas, dan kapasitas operasional ancillary yang, bila tidak diatasi, dapat menghambat transformasi dari desa wisata yang “ramai saat event” menjadi destinasi yang benar-benar berkelanjutan.

Tabel 1. Komponen 4A Pariwisata

Komponen (4A)	Kondisi Eksisting	Implikasi terhadap CBT & Keberlanjutan
Atraksi (Attraction)	Pasar Pancingan, area persawahan (212 ha), Kebun Herbal, budidaya rumput laut. Festival Sapi Pale, Tarian Puspanjali, Cooking Class, paket Durian Purba dan Magic Oil (Kearifan Lokal).	Kekuatan: Berbasis alam (Green Tourism) dan budaya lokal yang kuat. Keragaman atraksi memungkinkan perpanjangan length of stay (Lembur, 2018).



Komponen (4A)	Kondisi Eksisting	Implikasi terhadap CBT & Keberlanjutan
Aksesibilita s (Accessibilit y)	Jarak 8,1km dari KEK Mandalika (15-20 menit tempuh).	Kendala: Aksesibilitas menuju Sekretariat Desa Bilebante perlu perbaikan dan perluasan jalan.
Amenitas (Amenity)	Mushola, tempat sampah, toilet umum di Pasar Pancingan, <i>Homestay</i> .	Potensi: Fasilitas dasar tersedia. Pengembangan <i>homestay</i> menunjukkan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, selaras dengan CBT.
Ancillary (Lembaga Penunjang)	POKDARWI S, BUMDES, Koperasi, Mitra Kerja Sama Desa Bilebante. Diatur oleh Perdes No. 03 Tahun 2016.	Kekuatan: Kerangka kelembagaan yang kuat dan legal (Perdes 2016), mendukung pengelolaan yang terorganisir dan partisipasi formal.

Komponen (4A)	Implikasi	Kondisi terhadap	Eksisting CBT &
Analisis	Analisis	Analisis	Analisis
Struktur	Struktur	Struktur	Struktur
Proses	Proses	Proses	Proses
Hasil	Hasil	Hasil	Hasil

Keberlanjutan Atraksi (Attraction) Pasar Pancingan, area persawahan (212 ha), Kebun Herbal, budidaya rumput laut. Festival Sapi Pale, Tarian Puspanjali, Cooking Class, paket Durian Purba dan Magic Oil (Kearifan Lokal).

Kekuatan: Berbasis alam (Green Tourism) dan budaya lokal yang kuat. Keragaman atraksi memungkinkan perpanjangan length of stay (Lembur, 2018). Aksesibilitas (Accessibility) Jarak 8,1km dari KEK Mandalika (15-20 menit tempuh).

Kendala: Aksesibilitas menuju Sekretariat Desa Bilebante perlu perbaikan dan perluasan jalan

Amenitas (Amenity) Mushola. tempat

sampah, toilet umum di Pasar Pancingan, Homestay. Potensi: Fasilitas dasar tersedia. Pengembangan homestay menunjukkan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, selaras dengan CBT.

Ancillary (Lembaga Penunjang) POKDARWIS, BUMDES, Koperasi, Mitra Kerja Sama Desa Bilebante. Diatur oleh Perdes No. 03 Tahun 2016. Kekuatan: Kerangka kelembagaan yang kuat dan legal (Perdes 2016), mendukung pengelolaan yang terorganisir dan partisipasi formal.

Sumber: Konstruksi Peneliti, 2025

4.2 Implementasi Prinsip Community-Based Tourism (CBT) di Bilebante

Analisis penerapan prinsip-prinsip Community-Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Bilebante menunjukkan bahwa hampir seluruh dimensi yang dirumuskan Suansri—ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik/kelembagaan—telah hadir dalam praktik, tetapi berjalan secara timpang dan memunculkan friksi keberlanjutan. Status desa wisata mandiri tidak secara otomatis menjamin keberlanjutan apabila tidak ditopang oleh kapasitas tata kelola dan regenerasi aktor.

Temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Bilebante telah mencapai tahap fungsional, di mana komunitas terlibat dalam pengelolaan dan memperoleh manfaat ekonomi langsung. Namun, keterlibatan tersebut belum diikuti oleh mekanisme regenerasi aktor, penguatan kapasitas manajerial, dan sistem tata kelola yang adaptif. Kondisi ini mengonfirmasi pandangan Rasoolimanesh et al. (2022) bahwa partisipasi tinggi tanpa tata kelola yang kuat justru menciptakan keberlanjutan semu (pseudo-sustainability). Dengan demikian, CBT di Bilebante merepresentasikan community-driven development yang belum sepenuhnya didukung governance yang efektif.

4.2.1 Prinsip Sosial: Partisipasi Fungsional, Regenerasi Macet

Pada dimensi sosial, partisipasi warga Bilebante sudah mencapai tingkat fungsional:



masyarakat terlibat dalam pengelolaan atraksi, menerima manfaat ekonomi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat operasional. Ini sejalan dengan indikator Suansri mengenai peningkatan kualitas hidup dan kebanggaan komunitas. Namun, rendahnya minat generasi muda untuk masuk ke struktur pengelolaan mengindikasikan bahwa mekanisme penguatan organisasi komunitas dan pembagian peran lintas generasi belum berjalan baik. Di titik ini, prinsip sosial CBT tampak terwujud di permukaan, tetapi gagal menjamin kesinambungan aktor, sehingga keberlanjutan menjadi sangat bergantung pada figur-figur pionir yang menua.

4.2.2 Prinsip Ekonomi: Manfaat Ada, Stabilitas Rapuh

Secara ekonomi, Bilebante telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru melalui homestay, UMKM kuliner, jasa pemandu, dan aktivitas wisata berbasis komunitas, sesuai indikator Suansri tentang terbentuknya dana komunitas, pekerjaan, dan pendapatan lokal. Namun, sebagian besar usaha bergantung pada kedatangan rombongan yang melakukan reservasi, bukan pada arus kunjungan harian yang stabil. Pola ini membuat ekonomi desa wisata lebih menyerupai “ekonomi event” daripada ekonomi destinasi yang berkelanjutan, sehingga prinsip ekonomi CBT hanya terpenuhi secara parsial: manfaat hadir, tetapi rapuh dan sangat sensitif terhadap fluktuasi pasar. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam strategi pemasaran dan pengelolaan.

4.2.3 Prinsip Budaya: Pelestarian Ada, Institusionalisasi Lemah

Bilebante mengemas budaya lokal melalui Festival Sapi Pale, tarian Puspanjali, dan produk kearifan lokal seperti magic oil dan paket durian purba, yang mencerminkan indikator Suansri tentang penghormatan budaya dan pertukaran budaya. Namun, keterbatasan pelatih lokal dan absennya integrasi yang kuat ke dalam sistem edukasi formal maupun nonformal menyebabkan pelestarian budaya cenderung bersifat proyek

dan event-based. Budaya tampil ketika ada tamu atau lomba, tetapi tidak diinstitusikan sebagai praktik keseharian yang dijaga lintas generasi; di sini prinsip budaya CBT berfungsi lebih sebagai komoditas daripada basis reproduksi identitas kolektif yang kokoh.

4.2.4 Prinsip Lingkungan: Narasi Hijau, Infrastruktur Tidak Mengikuti

Secara deklaratif, Desa Bilebante memposisikan diri sebagai Desa Wisata Hijau dengan upaya pengurangan plastik dan pemanfaatan lanskap pertanian sebagai atraksi utama, sejalan dengan prinsip lingkungan Suansri tentang konservasi dan carrying capacity. Namun, tidak adanya TPA desa yang memadai membuat sistem pemilahan sampah berakhir pada praktik pembuangan yang tidak terkelola, berpotensi mencemari lahan dan merusak basis ekologis green tourism itu sendiri. Dengan demikian, dimensi lingkungan CBT justru menjadi titik friksi keberlanjutan paling serius: retorika konservasi tidak didukung tata kelola dan infrastruktur lingkungan yang memadai.

4.2.5 Prinsip Politik/Kelembagaan: Legitimasi Formal Ada, Daya Mengikat Lemah

Pada tingkat politik/kelembagaan, keberadaan POKDARWIS, BUMDes, koperasi, dan Perdes No. 03 Tahun 2016 menunjukkan upaya memenuhi prinsip politik Suansri—peningkatan partisipasi, perluasan kekuasaan komunitas, dan jaminan hak masyarakat atas sumber daya. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa tata kelola ini belum benar-benar adaptif dan akuntabel: keputusan strategis masih didominasi aktor tertentu, koordinasi dengan pemerintah daerah belum konsisten, dan dukungan struktural untuk isu-isu krusial (sampah, keamanan, regenerasi) belum kuat. Dalam kacamata Suansri, situasi ini menempatkan Bilebante dalam posisi paradoksal: semua prinsip CBT hadir dalam bentuknya, tetapi tidak cukup kuat dan seimbang untuk mengamankan keberlanjutan jangka panjang. Prinsip ekonomi berjalan tanpa stabilitas, prinsip sosial tanpa regenerasi, prinsip budaya tanpa



institutionalisis, prinsip lingkungan tanpa infrastruktur, dan prinsip politik tanpa governance yang efektif, sehingga CBT di Bilebante lebih tepat dibaca sebagai praktik yang “hampir ideal secara normatif, tetapi timpang secara kelembagaan”.

4.3 Dinamika Tata Kelola: Antara Partisipasi Fungsional dan Kerapuhan Institusional

Secara formal, Bilebante memiliki kerangka kelembagaan yang tampak kokoh melalui POKDARWIS, BUMDes, koperasi, dan pengaturan lewat Perdes No. 03 Tahun 2016 yang mengatur pengelolaan desa wisata. Struktur ini sejalan dengan gagasan good tourism governance yang menekankan koordinasi antarpemangku kepentingan dan pelibatan komunitas lokal sebagai aktor utama. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa tata kelola tersebut lebih bersifat administratif daripada substantif.

Seorang pengurus POKDARWIS menegaskan, “Struktur sudah ada di kertas, tapi kalau rapat dan keputusan besar, tetap yang itu-itu saja yang datang dan memutuskan.” Pernyataan ini mengindikasikan konsentrasi keputusan pada aktor tertentu dan ketiadaan mekanisme checks and balances yang kuat, sehingga partisipasi cenderung fungsional tetapi belum transformatif.

Kondisi ini mengkonfirmasi temuan Rasoolimanesh et al. (2022) bahwa tingginya partisipasi komunitas tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas tata kelola; tanpa regulasi internal yang jelas dan dukungan institusional yang konsisten, CBT cenderung terjebak pada keberlanjutan semu (pseudo-sustainability). Dalam kerangka Su, Wall, dan Xu (2020), Bilebante merepresentasikan community-driven development yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh governance yang adaptif dan kolaboratif lintas pentahelix.

4.4 Friksi Regenerasi Aktor dan Visi Jangka Panjang

Salah satu friksi keberlanjutan paling krusial muncul pada dimensi regenerasi aktor

pariwisata. Secara permukaan, partisipasi masyarakat terlihat tinggi: warga terlibat dalam Pasar Pancingan, homestay, atraksi budaya, dan layanan wisata. Namun, keterlibatan generasi muda relatif rendah dan cenderung bersifat insidental. Seorang informan muda menyatakan, “Kalau ada event besar, kami bantu. Tapi untuk terlibat tetap di pengelolaan, kami masih bingung masa depannya seperti apa.”

Temuan ini memperlihatkan bahwa partisipasi yang ada belum diikuti oleh skema pewarisan peran dan kepemimpinan yang sistematis. Dalam perspektif keberlanjutan, tidak adanya regenerasi aktor berarti struktur CBT yang saat ini berjalan sangat bergantung pada figur pionir; ketika para penggerak awal menua atau mundur, risiko disrupti tata kelola meningkat secara signifikan.

Secara teoretik, hal ini berseberangan dengan prinsip “kepemilikan lokal berkelanjutan” dalam CBT yang menuntut distribusi kekuasaan dan kapasitas antar generasi. Giampiccoli dan Mtapuri (2020) menegaskan bahwa CBT yang sehat menempatkan komunitas sebagai subjek jangka panjang, bukan sekadar tenaga kerja sesaat. Ketidakhadiran strategi regenerasi di Bilebante (misalnya integrasi program pemuda, kurikulum sekolah, atau skema magang kepemimpinan) merupakan friksi kelembagaan yang mengancam kontinuitas governance.

4.5 Ekonomi Desa Wisata: Ketergantungan Reservasi dan Risiko Pseudo-Sustainability

Dari sisi ekonomi, CBT di Bilebante telah membuka peluang penghasilan baru melalui UMKM kuliner, homestay, dan jasa pendukung wisata, selaras dengan prinsip ekonomi CBT Suansri (2003). Namun aliran pendapatan terbukti rapuh karena sangat bergantung pada kedatangan rombongan yang melakukan reservasi sebelumnya. Seorang pelaku UMKM menggambarkan kondisi ini: “Kalau tidak ada rombongan, lapak kami tutup. Tidak mungkin buka setiap hari karena sepi, nanti rugi banget.” Kutipan ini menegaskan bahwa basis ekonomi desa wisata



belum memiliki pasar yang cukup stabil, sehingga keberlanjutan ekonomi lebih mirip event-based economy daripada ekonomi destinasi yang beroperasi rutin.

Situasi tersebut mencerminkan friksi antara narasi “desa wisata mandiri” dengan realitas ketergantungan pada pola kunjungan tertentu. Dalam perspektif pariwisata berkelanjutan, ketergantungan yang tinggi pada satu segmen pasar (rombongan) meningkatkan kerentanan sistemik, terutama ketika terjadi guncangan eksternal seperti pandemi atau perubahan kebijakan perjalanan. Kondisi ini cocok dengan konsep pseudo-sustainability yang dibahas dalam hasil penelitian: indikator partisipasi dan aktivitas ekonomi tampak positif, tetapi fondasi ekonomi sebenarnya sempit dan rentan. Temuan ini memperkuat pandangan Putra et al. (2023) bahwa CBT hanya dapat menjadi instrumen keberlanjutan ketika diversifikasi ekonomi, akses pasar, dan kapasitas pemasaran komunitas benar-benar diperkuat, bukan ketika hanya mengandalkan arus wisata yang dikurasi pihak luar.

4.6 Green Tourism dalam Tekanan: Kelembagaan Lingkungan yang Renta

Secara diskursif, Bilebante memposisikan diri sebagai “Desa Wisata Hijau” dengan berbagai inisiatif seperti pengurangan plastik, pengelolaan kebun herbal, dan pemanfaatan lanskap sawah sebagai atraksi utama. Upaya ini sejalan dengan prinsip lingkungan dalam CBT yang mengharuskan konservasi sumber daya dan pengelolaan daya dukung kawasan. Namun, ketiadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai mengungkap paradoks serius dalam tata kelola lingkungan. Seorang perangkat desa mengakui, “Kami sudah pisahkan sampah di Pasar Pancingan, tapi ujung-ujungnya bingung dibuang ke mana. Kadang masih numpang ke desa sebelah atau ditimbun di lahan warga.” Praktik ini berpotensi menimbulkan dampak ekologis jangka panjang pada lahan pertanian yang justru menjadi basis atraksi green tourism.

Dari sudut pandang governance, problem ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan

internal desa tidak didukung oleh infrastruktur dan koordinasi lintas level (desa–kecamatan–kabupaten). Su, Wall, dan Xu (2020) menekankan bahwa keberhasilan CBT bergantung pada hubungan sinergis antara komunitas lokal dan struktur pemerintahan formal dalam mengelola sumber daya alam. Di Bilebante, absennya dukungan kuat dari pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah menunjukkan adanya governance gap yang secara langsung memicu friksi keberlanjutan ekologis.

4.7 Politik Kebudayaan dan Kapasitas SDM: Antara Pelestarian dan Komodifikasi

Pada dimensi budaya, Bilebante memiliki aset penting seperti Festival Sapi Pale, tarian Puspanjali, dan paket magic oil serta durian purba yang mengemas kearifan lokal ke dalam produk wisata. Hal ini sejalan dengan prinsip budaya CBT yang mendorong penghormatan terhadap keragaman budaya dan pertukaran budaya yang saling menguatkan. Namun, penelitian mengungkap keterbatasan kapasitas pelatih lokal dan minimnya integrasi nilai budaya ke dalam sistem edukasi formal maupun nonformal. Seorang tetua adat menyatakan, “Yang bisa melatih tari dan adat makin sedikit. Anak-anak mau belajar kalau ada lomba atau tamu, habis itu hilang lagi.”

Pernyataan ini menandakan bahwa pelestarian budaya berjalan secara sporadis dan sering kali baru digerakkan ketika ada kepentingan ekonomi sesaat.

Lebih jauh, kelemahan kapasitas edukasi pemandu wisata (khususnya bahasa asing) mempersempit ruang interaksi budaya langsung dengan wisatawan mancanegara. Seorang pemandu mengaku, “Kalau tamu bule datang, kami sering dibantu teman yang bisa bahasa Inggris. Kalau tidak, kami pakai bahasa tubuh saja.” Dalam kerangka CBT, keterbatasan ini bukan sekadar isu teknis komunikasi, tetapi berkaitan dengan daya tawar komunitas dalam mengartikulasikan narasi dan identitas budaya secara mandiri di hadapan pasar global. Kondisi tersebut sejalan



dengan kritik Giampiccoli dan Mtapuri (2020) bahwa tanpa penguatan kapasitas kritis dan kultural, CBT berisiko terjebak pada komodifikasi dangkal yang melayani selera pasar tanpa benar benar memperkuat posisi sosial-budaya komunitas. Di Bilebante, friksi keberlanjutan budaya muncul ketika agenda pelestarian dan agenda komersialisasi budaya tidak ditopang oleh strategi kapasitas SDM yang berkelanjutan.

4.8 Sintesis: Dari Community Driven Development menuju Governance-Driven Sustainability

Secara keseluruhan, dinamika di Desa Wisata Bilebante menggambarkan pola community-driven development yang kuat pada level inisiatif dan partisipasi, tetapi rapuh pada dimensi tata kelola kelembagaan dan dukungan struktural. Partisipasi masyarakat, keragaman atraksi, dan pencitraan sebagai desa wisata hijau menunjukkan capaian penting CBT, namun friksi keberlanjutan muncul pada empat simpul utama: regenerasi aktor, stabilitas ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan kapasitas budaya-edukasi.

Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa keberhasilan CBT tidak dapat diukur semata dari intensitas keterlibatan komunitas, melainkan harus memasukkan kualitas governance sebagai variabel penentu. Dalam bahasa Rasoolimanesh et al. (2022), Bilebante menghadirkan contoh nyata bagaimana partisipasi tinggi tanpa dukungan governance yang kuat berujung pada pseudo-sustainability keberlanjutan yang tampak berjalan, tetapi rentan runtuh ketika menghadapi tekanan struktural dan lingkungan. Dengan demikian, jalan menuju keberlanjutan sejati di Desa Wisata Bilebante menuntut pergeseran dari sekadar community-driven menjadi governance-driven sustainability yaitu model di mana inisiatif komunitas dipertautkan secara erat dengan penguatan kelembagaan lokal, kolaborasi pentahelix, dan dukungan kebijakan lintas level yang konsisten

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Community-Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Bilebante telah berhasil mencapai tahap partisipasi fungsional, namun belum bertransformasi menjadi keberlanjutan jangka panjang yang kokoh. Meskipun masyarakat terlibat aktif dalam pemanfaatan ekonomi dan pengelolaan melalui POKDARWIS serta BUMDES, ditemukan adanya "friksi keberlanjutan" yang signifikan.

Friksi ini bersumber dari persoalan struktural dan kelembagaan, meliputi: (1) krisis regenerasi aktor pariwisata akibat rendahnya minat generasi muda; (2) ketergantungan ekonomi pada sistem reservasi kelompok yang tidak stabil; dan (3) anomali infrastruktur lingkungan, terutama ketiadaan sistem pengelolaan sampah akhir (TPA) yang mendukung visi Green Tourism. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi komunitas tanpa dukungan tata kelola (governance) yang kuat dan adaptif hanya akan menciptakan keberlanjutan semu (pseudo-sustainability).

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan: POKDARWIS dan BUMDES perlu melakukan transformasi manajerial dengan mengadopsi sistem pemasaran digital yang mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada agen perjalanan pihak ketiga.
2. Strategi Regenerasi dan Edukasi: Pemerintah Desa bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu mengintegrasikan kurikulum budaya lokal dan pelatihan bahasa asing sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah lokal untuk menjamin keberlanjutan SDM di masa depan.
3. Investasi Infrastruktur BerkelaJutan: Mendesak percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala desa dan peningkatan fasilitas keamanan



- (CCTV serta asuransi wisatawan) untuk menjaga citra positif destinasi.
4. Diversifikasi Produk: Pengelola perlu mengidentifikasi dan mengembangkan narasi lokal (storytelling) untuk menciptakan produk wisata budaya yang bersifat semi-permanen di luar festival tahunan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmed, I., & Jahan, N. (2013). Rural Tourism—Prospects in Rustic Bengal. European Journal of Business and Management, 5(16), 163–172.
- [2] Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40.
- [3] Budiatiningsih, M., Putri, B. P., & Dini, M. F. (2024). KEBERHASILAN PENERAPAN KONSEP PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT: STUDI KASUS DI DESA WISATA NGLANGGERAN. Jurnal Ilmiah Hospitality, 13(1), 123. <https://doi.org/10.47492/jih.v13i1.3380>
- [4] Crăciun, A. M., Dezsi, Ştefan, Pop, F., & Cecilia, P. (2022). Rural Tourism—Viable Alternatives for Preserving Local Specificity and Sustainable Socio-Economic Development: Case Study—“Valley of the Kings” (Gurghiului Valley, Mureş County, Romania). Sustainability (Switzerland), 14(23). <https://doi.org/10.3390/su142316295>
- [5] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design (4th ed.). Sage.
- [6] Damanik, J. (2013). Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan. Pustaka Pelajar.
- [7] Febrian, A. W., & Suresti, Y. (2020). Pengelolaan wisata kampung blekok sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis community based tourism kabupaten situbondo. JURNAL ADMINISTRASI BISNIS, 9(2), 139. <https://doi.org/10.14710/jab.v9i2.25308>
- [8] Hadi, M. J., Lume, L., & Widyaningrum, M. (2022). Pemetaan Potensi Wisata, Peluang dan Tantangan Pengembangan Desa Wisata Pengadegan Barat, Kabupaten Lombok Timur. Journal of Tourism and Economic, 5(1), 32–45. <https://doi.org/10.36594/jtec.v5i1.138>
- [9] Hulu, M. (2016). Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Studi Kasus: Desa Wisata “Blue Lagoon” Di Kabupaten Sleman, DIY. Journal of Tourism and Economic, 1(2), 73–81.
- [10] Kriska, M., Andiani, R., & Simbolon, T. G. Y. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM COMMUNITY BASED TOURISM DI DESA WISATA PUTON WATU NGELAK KABUPATEN BANTUL. JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics), 12(1), 11. <https://doi.org/10.19184/jsep.v12i1.9606>
- [11] Lina, F. Y. (2023). Community-Based Tourism (CBT): A Community Development Tool. European Journal of Business and Management. <https://doi.org/10.7176/ejbm/15-17-01>
- [12] Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2014). Towards a comprehensive model of community-based tourism development. South African Geographical Journal, 98(1), 154. <https://doi.org/10.1080/03736245.2014.977813>
- [13] Nambisan, S. (2008). Transforming Government Through Collaborative Innovation. Washington, DC: IBM Center for The Business of Government.
- [14] Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods (4th ed.). Sage.
- [15] Pradnyadari, I. G. A. (2023). Heterogenitas dalam Homogenitas: Praktik Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Krebet, Bantul, Yogyakarta. Pustaka: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, 23(2), 147-154. <https://doi.org/10.24843/PJIIB.2021.v21.i02>



- [16] Purmada, D. K., Wilopo, & Hakim, L. (2016). Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 32(2), 15–22.
- [17] Putra, S. A., Fatmasari, B. R., Annisa, L., & Furqan, A. (2023). PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT: LANGKAH TEPAT KEBERLANJUTAN? *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 159. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2023.v10.i01.p07>
- [18] Rahmadani, N. D., & Agustina, I. F. (2024). Pengembangan Berbasis Gender: Mengubah Dinamika Desa di Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues.*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i1.34>
- [19] Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., & Ahmad, A. G. (2022). Community participation and sustainable tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(1), 1–19.
- [20] Su, M. M., Wall, G., & Xu, K. (2020). Community-based tourism and governance. *Sustainability*, 12(15), 1–18.
- [21] Suansri, P. 2003. Community Based Tourism Handbook. Bangkok, Thailand: Responsible Ecological Social Tours (REST) Project.
- [22] Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- [23] Syarifah, R., & Rochani, A. (2022). Studi Literatur: Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 109. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19983>
- [24] Yuwardhani, A. M., Heriyanto, H., Qadri, U., Rinaldi, H., Wana, D., Tandra, R., Sulaiman, S., & Prestoroika, E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendampingan untuk Pengembangan Pariwisata pada Desa Sungai Kupah. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 176. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v2i2.239>
- [25] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis (3rd ed.). Sage.
- [26] Yin, R. K. (2018). Case study research and applications (6th ed.). Sage Publications.